



Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang

Margareta Adventa Darlen¹, Thomas Ola Langoday², Jou Sewa Adrianus³, M.E. Perseveranda⁴, Stanis Man⁵

¹Program Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: darlenventa@gmail.com

²Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: thomasolalangoday@gmail.com

³Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: adrianusjousewa@gmail.com

⁴Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: perseverandaerse@gmail.com

⁵Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, email: stanisman08@gmail.com

Corresponding author: darlenventa@gmail.com

Abstract: Kualitas laporan keuangan merupakan penilaian normatif yang terwujud melalui informasi akuntansi agar bisa menempati tujuan, dengan indikator sesuai, terpercaya, bisa menjadi perbandingan, dan dapat dimengerti. Masalah dalam kajian ini, yaitu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang belum menyanggupi ketentuan nilai informasi yang dipersyaratkan. Kondisi ini terjadi akibat ada penyelewengan yang dijumpai BPK selama mengaudit LKPD Pemerintah Kota Kupang. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan mengetahui apakah komitmen organisasi, kompetensi SDM, sistem pengendalian intern maupun implementasi standar akuntansi pemerintahan berakibat ke mutu laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang. Karya ilmiah ini berpendekatan deskriptif kuantitatif, yakni menguraikan ke bentuk tabel, grafik terhadap situasi objek dan hasil kajian menggunakan analisis *partial least square* yang peneliti operasikan dari Smart PLS versi 3.0. Pengumpulan data peneliti lakukan mempergunakan angket ke 90 informan melalui *puspositive sampling*. Hasil analisis statistik deskriptif memperjelas bila deskripsi variabel komitmen organisasi, kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang berkategori baik. Hasil analisis statistik inferensial memperjelas bila variabel komitmen organisasi, kompetensi SDM, sistem pengendalian intern dan penerapan SAP memengaruhi penting bagi kualitas laporan keuangan. Sesuai hasil ini, disarankan kepada OPD Pemerintah Kota Kupang untuk membuat kebijakan dan peraturan kinerja agar bisa dilaksanakan secara maksimal oleh organisasi, membuat program pendidikan dan pelatihan keahlian menyusun laporan keuangan demi memaksimalkan mutu laporan keuangan, melakukan pemantauan hasil pekerjaan untuk menghindari penyimpangan dan melakukan pengecekan kinerja karyawan. Selama membuat laporan keuangan perlu selalu dilandasi dengan standar akuntansi pemerintahan demi memaksimalkan mutu laporan keuangan.

Keyword: *Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kualitas Laporan Keuangan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan termasuk tanggung jawab tertulis pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan demi merealisasikan keterbukaan dana dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan pemerintah (Prasetya, 2005). Setiap pemimpin di suatu wilayah berkewajiban dalam melaporkan keuangannya kepada DPRD maupun masyarakat sesudah teraudit oleh badan pemeriksaan keuangan (Suwardjono, 2015: 164–177). Abdul Hafiz Tanjung (2018: 13-15) memperjelas bila mutu laporan keuangan merupakan indikator normatif yang terwujud melalui informasi akuntansi, maka bisa memperoleh tujuannya, dengan indikatornya ialah sesuai, terpercaya, bisa dijadikan perbandingan, dan dapat dimengerti.

Fakta pada OPD Kota Kupang memperjelas jika ada penyalahgunaan yang BPK temukan selama melaksanakan audit LKPD Pemerintah Kota Kupang. Dari Siaran Pers BPK Tahun Anggaran 2016-2018, Pemerintah Kota Kupang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Opini WDP tergolong sebagai opini audit yang terbit bila mayoritas laporan keuangan terbebas dari kesalahan dalam menyajikan material, terkecuali rekening/item tertentu sebagai pengecualiannya (Nurillah, 2014). Terdapat kelemahan verifikasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana BOS yang belum optimal, tidak akuratnya pencatatan laporan keuangan, terdapat disimilaritas pencatatan aset tetap antara bidang akuntansi maupun aset dengan OPD dan ketidaksesuaian pencatatan laporan keuangan berdasar pada standar akuntansi pemerintah. Tahun anggaran 2019-2020, BPK memberi Opini WTP untuk laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang, namun BPK masih mendapati beberapa masalah pencatatan laporan keuangan.

Dari fenomena lapangan, berupa siaran pers opini BPK dan hasil wawancara di atas, terlihat 4 variabel dominan yang memengaruhi mutu laporan finansial Pemerintah Kota Kupang, yaitu komitmen organisasi, ketersediaan sumber daya manusia, sistem untuk mengendalikan internal, dan penerapan SAP. Pada kajian terdahulu sudah memperjelas bila banyak faktor yang berakibat ke mutu laporan keuangan pemerintah daerah/kota. Namun, sesuai objek kajian ini, ada empat faktor yang memengaruhi mutu laporan finansial Pemerintah Kota Kupang yang diuji. *Pertama*, Vandenberg (1992) dalam Stasya Meyly Tingginehe dkk (2021: 1354), menyatakan faktor komitmen organisasi berakibat ke mutu laporan finansial. Komitmen organisasi ialah loyalitas tenaga kerja dan berkeinginan untuk berpartisipasi maupun berupaya memaksimalkan organisasi, maka informasi laporan keuangan dapat dimaksimalkan. Indikatornya, identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas. *Kedua*, Widodo (2001), dalam Rizki Afri Mulia (2018: 11) bila faktor kompetensi SDM berpengaruh ke mutu laporan finansial. Kompetensi SDM adalah kemampuan SDM menjalankan pertanggungjawaban dengan kemampuan, pendidikan, pelatihan maupun pengalaman yang layak. Indikatornya meliputi latar belakang pendidikan, diklat, dan pengalaman. *Ketiga*, I Gusti Agung Rai (2008) dalam Wirmie Eka Putra (2017: 285), menyatakan, faktor SPI berpengaruh ke mutu laporan finansial. SPI ialah kewenangan atau tata cara yang dibuat agar bisa meyakinkan manajemen bila organisasi sudah memenuhi tujuan. Indikatornya, seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan informasi ataupun komunikasi. *Keempat*, Bastian (2006), dalam Nonce Dian (2017: 131), menyatakan faktor penerapan SAP berpengaruh ke mutu laporan finansial. SAP ialah prinsip akuntansi yang diimplementasikan ke penyajian laporan finansial pemerintah, serta syarat yang mempunyai kekuatan hukum untuk mengoptimalkan mutu laporan keuangan. Indikatornya, yaitu akuntabilitas, manajemen, dan transparansi.

Di samping teori, ditampilkan juga sejumlah fenomena riset mutakhir sejak tahun 2017 sampai 2021 di Indonesia. *Pertama*, hasil riset Stasya Meily Tingginehe dkk (2021) memperjelas bila komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi, implementasi SAP maupun supervise keuangan daerah memengaruhi positif dan cukup penting bagi mutu laporan keuangan di satuan

kerja perangkat daerah (SKPD). Berbeda dengan implementasi SPIP tidak berakibat positif dan cukup penting bagi mutu laporan keuangan daerah pada SKPD Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Talaud. *Kedua*, hasil riset Rizki Afri Mulia (2018) memperjelas bila kompetensi sumber daya manusia maupun SPI berakibat positif dan cukup penting bagi mutu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat. *Ketiga*, Wirmie Eka Putra (2017) menunjukkan, SAP, SPI, Kualitas SDM berakibat positif dan penting bagi mutu laporan finansial Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Keempat*, Gusrya Indria Sari, Fadli (2017) memperjelas bila implementasikan *good governance*, implementasikan SAP, pemakaian sistem informasi akuntansi keuangan daerah berakibat positif dan cukup penting bagi mutu laporan finansial daerah. *Kelima*, Nonce Dian (2017) memperjelas jika kompetensi SDM dan SPI tidak berakibat positif dan cukup penting bagi mutu LKPD, sedangkan implementasi SAP berakibat positif dan cukup penting bagi mutu LKPD. Berbeda dari riset-riset itu, peneliti ingin menguji pengaruh faktor tersebut terhadap mutu laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang untuk membandingkannya dengan hasil riset di daerah/kota lain di Indonesia. Studi peneliti di Kota Kupang jika dibandingkan dengan riset mereka, selain berbeda tempat, konfigurasi variabel dan analisis statistik juga berbeda.

METODE PENELITIAN

Metode dalam kajian ini memanfaatkan deskriptif kuantitatif sebagai kombinasi metode kuantitatif dan deskriptif. Populasi pada karya ilmiah ini, yaitu seluruh pengelola unit kerja dan pejabat struktural di 30 organisasi perangkat daerah (OPD) bagian keuangan di Pemerintah Kota Kupang sejumlah 150 orang. Penentuan sampel memanfaatkan *nonprobability sampling*, yakni *purposive sampling*. Dengan demikian, sampel yang diambil pada karya ilmiah ini ialah 90, meliputi kepala dinas, kepala subbagian keuangan maupun bendahara. Kajian ini mempergunakan angket yang menjadi media untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data pada kajian ini mempergunakan statistik. Terdapat dua macam jenis statistik, yakni statistik deskriptif dan inferensial mempergunakan *partial least square* (PLS) versi 3.0.

Definisi Operasional Variabel, Indikator dan Skala Pengukuran

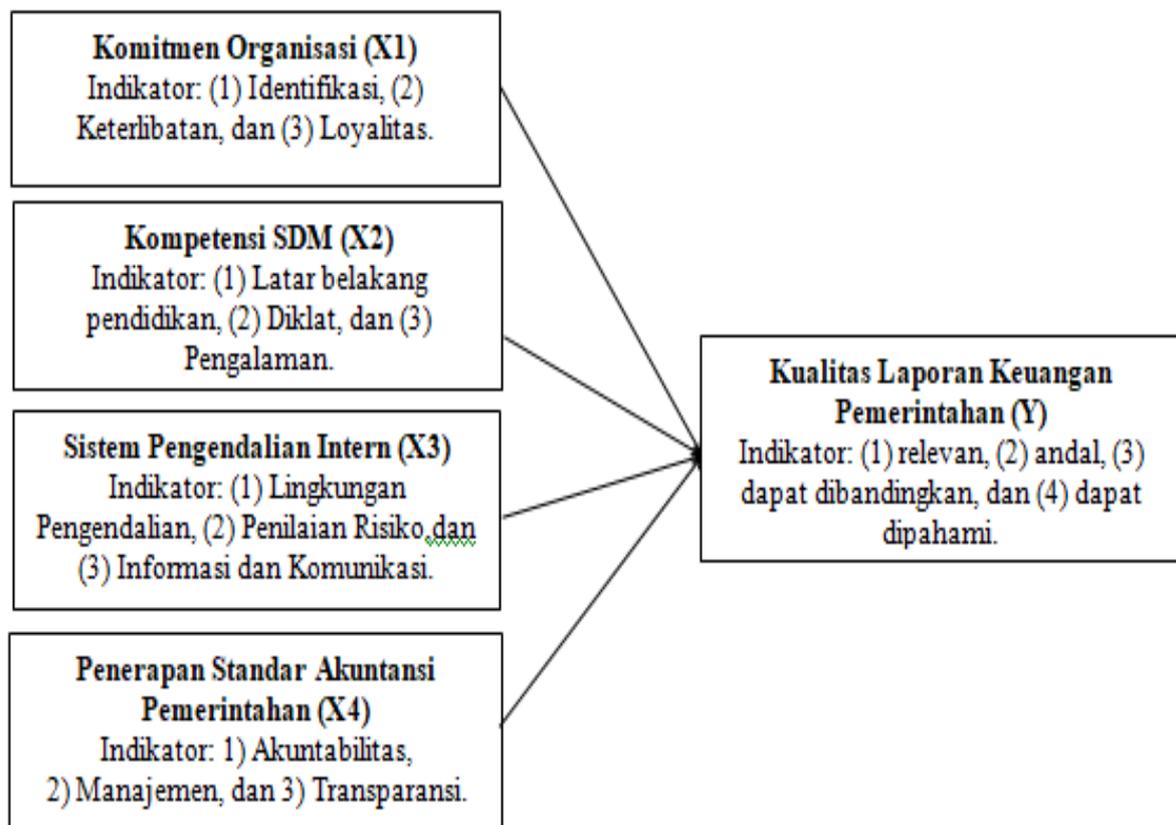
Tabel 1

Variabel	Definisi Variabel Penelitian	Indikator Operasional	Skala Pengukuran
Variabel Dependen			
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Hasil pengelolaan keuangan bisa menciptakan laporan keuangan yang diterima seluruh kalangan	1) Sesuai 2) Terpercaya 3) Bisa menjadi perbandingan 4) Bisa dimengerti	Ordinal
Variabel Independen			
Komitmen Organisasi (X1)	Keterlibatan semua pegawai dalam melaksanakan seluruh aktivitas organisasi	1) Identifikasi 2) Keterlibatan 3) Loyalitas	Ordinal
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	Keterampilan tenaga kerja selama melaksanakan tanggung jawab maupun tugasnya sesuai bidang keahlian dan keterampilan	1) Tingkat pendidikan 2) Diklat 3) Pengalaman	Ordinal
Sistem Pengendalian Intern (X3)	Aktivitas yang pimpinan lakukan selama menetapkan situasi yang aman, tenang maupun damai bagi pegawai	1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) informasi maupun komunikasi	Ordinal

	dalam pekerjaan		
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X4)	Aktivitas yang dilakukan secara transparan dalam pelaporan keuangan yang bermutu dalam meningkatkan kinerja pemerintah	1) Akuntabilitas 2) Manajemen 3) Transparansi	Ordinal

Kerangka Berpikir

Beracuan ke PP No. 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan wajib terpercaya, sesuai, bisa dimengerti, dan bisa dijadikan perbandingan supaya laporan keuangan itu disebut bermutu. Kian berkualitas laporan keuangan, maka merepresentasikan pertanggungjawaban kepala daerah berdasar pada kewenangannya dalam mengelola organisasi. Untuk memenuhi sebuah laporan keuangan berkualitas dibutuhkan komitmen organisasi sebagai upaya untuk menegakkan kepatuhan dalam menyajikan laporan keuangan secara reliabel sesuai SAP. SDM pun turut andil dalam menentukan mutu laporan finansial. Jika SDM tidak memiliki kompetensi di bidangnya, tentu mutu laporan finansial yang diterbitkan tidak bermutu.



Gambar 1

Hipotesis Penelitian

Sesuai pemaparan di atas, rumusan hipotesis yang menjadi jawaban sementara pada penulisan ini ialah:

- 1) Gambaran komitmen organisasi maupun SDM, sistem pengendalian internal, implementasi standar akuntansi pemerintahan dan mutu laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang tergolong baik.
- 2) Komitmen organisasi berakibat penting ke mutu laporan keuangan.
- 3) Kompetensi SDM berakibat penting ke mutu laporan keuangan.

- 4) Sistem pengendalian internal berakibat penting ke mutu laporan keuangan.
- 5) Implementasi standar akuntansi pemerintahan berakibat penting ke mutu laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan keterlibatan semua pegawai melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. OPD harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah melalui laporan keuangan. Perihal ini perlu mendapat dukungan oleh komitmen, kejelasan rencana, sistematisa pengontrolan, dan pejabat yang berfugas untuk memperbaiki laporan finansial. Tanggapan pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Kupang dari 90 responden komitmen organisasi dari 9 item tanggapan pernyataan variabel komitmen organisasi: masing-masing tanggapan pernyataan berkategori baik, maka terlihat dari rerata indikator, yakni identifikasi, keterlibatan dan loyalitas berkategori baik, secara umum variabel komitmen organisasi baik dengan skor 70,69.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai sumber daya yang diperlukan dan ialah penyangga utama untuk menggerakkan organisasi selama merealisasikan tujuan (Indriasih 2014). Kompetensi SDM yang baik bisa mendukung implementasi basis akrual di pemerintah agar menciptakan laporan finansial yang terpercaya. Sama seperti penuturan Kristiawati (2015), menyebut bila kompetensi SDM berakibat positif dan penting bagi implementasi akuntansi akrual di Pemerintah Kalimantan Barat. Kajian Supra (2016) juga menjelaskan, kompetensi SDM berakibat cukup penting bagi implementasi standar akuntansi keuangan dengan basis akrual. Pimpinan OPD Kota Kupang memberikan penilaian kompetensi SDM aparatur negara melalui pengukuran dari 9 item tanggapan atas pernyataan variabel kompetensi SDM, masing-masing pernyataan dalam kategori baik dan cukup baik, maka rata-rata masing-masing indikator yakni latar belakang pendidikan, diklat dan pengalaman berada dalam kategori baik, sehingga dari semua indikator yang dinilai dan diambil rata-rata atas penilai kompetensi SDM aparatur negara dengan skord 71,01 atau kategori baik.

Sistem Pengendalian Intern

Good governance merupakan isu paling mengemuka. Peran pemerintah yang mendominasi nyatanya tidak bisa mengarahkan pemerintah untuk melaksanakan tugas mulia dalam memakmurkan masyarakatnya. Diperlukan pengendali internal sebagai proses yang terintegrasi dari tindakan maupun aktivitas yang pimpinan laksanakan, serta semua karyawan bisa memberi rasa yakin secara layak terhadap pencapaian tujuan organisasi dengan aktivitas efektif atau efisien, laporan keuangan yang terpercaya, mengamankan aktiva negara dan kepatuhan kepada aturan undang-undang. Penilaian sistem pengendalian internal untuk menyajikan laporan keuangan kota Kupang berkualitas atas kinerja aparatur negara dari pengukuran 9 item tanggapan atas pernyataan variabel sistem pendalian internal, masing-masing pernyataan dalam kategori baik. Maka rata-rata masing-masing indikator, yakni lingkungan dalam mengendalikan, menilai risiko maupun informasi komunikasi dapat kategori baik sehingga dari semua indikator untuk menilai sistem pengendalian internal berkategori baik (70,81).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Nurlan Darise (2008: 39) menuturkan jika SAP berguna untuk dijadikan landasan dalam penyusunan laporan tanggung jawab penyelenggaraan APBN/APBD berwujud pelaporan perwujudan anggaran, pelaporan aliran kas maupun catatan terhadap laporan keuangan. Untuk menyajikan laporan bermutu, diperlukan SAP sebagai kerangka dalam tata cara membuat

laporan keuangan supaya ada kesesuaian dalam menyajikan laporan keuangan. Perihal ini berperan dalam memudahkan auditor dan memudahkan pembaca dalam memahami atau melakukan perbandingan atas laporan keuangan entitas yang berlainan. Pimpinan OPD Kota Kupang diberikan penilaian penerapan SAP oleh aparatur negara melalui pengukuran 9 tanggapan atas pernyataan variabel penerapan SAP atas masing-masing pernyataan dalam kategori baik dan cukup baik. Rata-rata tiap indikator, yakni akuntabilitas, manajemen dan transparansi berada dalam kategori baik, sehingga dari ketiga indikator yang ukur dan diperoleh nilai atas penerapan standar akuntansi keuangan oleh aparatur negara di Kota Kupang, dengan skor 71,75 atau kategori baik.

Kualitas Laporan Keuangan

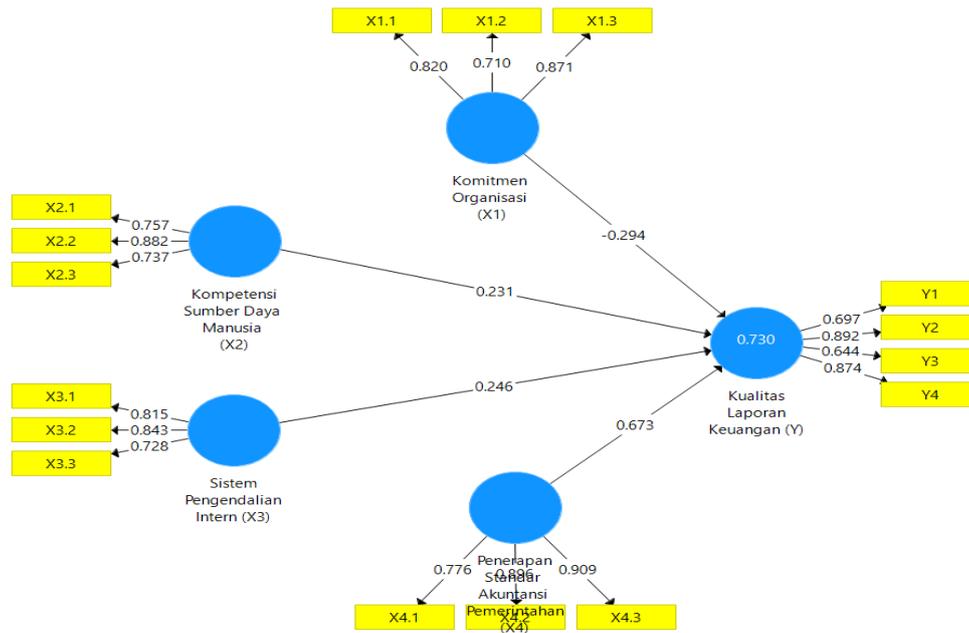
Kualitas laporan keuangan mempunyai ketentuan, relevansi dengan SAP, cukup dalam mengungkapkan, patuh dengan undang-undang, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Laporan keuangan bermutu tinggi dibutuhkan agar bisa menjaga kondisi ekonomi secara efisien dan mengalami pertumbuhan secara kontinu. Bagi masing-masing entitas, di bidang privat maupun publik untuk menjaga agar lebih akuntabel dan terbuka terkait laporan keuangan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005). Diperlukan kriteria persyaratan normatif supaya pelaporan keuangan pemerintah berkualitas relevan, andal, bisa menjadi perbandingan, dan bisa dimengerti. Untuk memenuhi harapan itu, diperlukan pengukuran mendapatkan evaluasi laporan keuangan sebagai kinerja aparatur negara di Satuan OPD. Penilaian kualitas laporan keuangan sebagai kinerja aparatur negara dari pengukuran 12 item tanggapan atas pernyataan variabel kualitas laporan keuangan, masing-masing pernyataan dalam kategori baik. Rata-rata tiap indikator ialah sesuai, terpercaya, bisa dijadikan perbandingan, dan dimengerti, maka seluruh indikator menilai mutu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang berkategori baik (73,26).

Hasil Analisis Inferensial

Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang

Unidimensionalitas konstruk bisa dilakukan evaluasi dari model pengukuran mempergunakan keandalan komposit maupun validitas konvergen dengan mengonstruksi variabel laten ke diagram jalur. Melalui pengujian validitas maupun realibilitas, kajian ini pun menguji indikator yang pantas dilakukan untuk kajian berikut. Dalam kajian ini, komitmen organisasi (X1), kompetensi SDM (X2), sistem pengendalian intern (X3), penerapan standar akuntansi pemerintahan (X4), dan kualitas laporan keuangan (Y) terbentuk melalui penggunaan jenis indikator refleksi (arah panah dari variabel laten mengarah ke konstruk). Faktor yang melatar belakangi pemakaian indikator refleksif di komitmen organisasi, kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, implemenyasi standar akuntansi pemerintahan, dan mutu laporan keuangan sebab indikator konstruk itu sebagai representasi konstruk/variabel laten. Perihal ini berdasar pada penjelasan Fornell dan Bookstein (1982), menyebut bila indikator konstruk atau mengenai sikap maupun profesionalitas sehingga perlu mempergunakan indikator reflektif.

Dari penuturan itu, kajian ini bisa dikonstruksi menjadi diagram jalur mempergunakan smartPLS versi 2.0. Lain dengan analisis data mempergunakan PLS-Graph versi 3.0 hasil pengembangan Wyene Chin. Gambar di bawah memperlihatkan diagram jalur persamaan struktural berpendekatan PLS mempergunakan Smartpls (*measurement model specification*) sebelum seleksi ke indikator tidak valid dan tidak reliabel.



Gambar 2

Keterangan Gambar:

- 1) Komitmen organisasi (X1) berindikator Identifikasi (X1.1), keterlibatan (X1.2), dan loyalitas (X1.3).
- 2) Kompetensi SDM (X2) berindikator latar belakang pendidikan (X2.1), diklat (X2.2), dan pengalaman (X2.3).
- 3) SPI (X3) berindikator: lingkungan pengendalian (X3.1), penilaian risiko (X3.2) maupun informasi & komunikasi (X3.3).
- 4) Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X4) berindikator akuntabilitas (X4.1), manajemen (X4.2), dan transparansi (X4.3)
- 5) Kualitas laporan keuangan (Y) berindikator sesuai (Y1), terpercaya (Y2), bisa dijadikan perbandingan (Y3), dan bisa dimengerti (Y4).

Uji Validitas dan Reliabilitas Data (first order)

Pada kajian ini, uji validitas data terlaksana melalui pengujian validitas konvergen dan diskriminan, sedangkan pengujian reliabilitas terlaksana melalui pengujian reliabilitas komposit. Agar bisa mencari tahu apakah indikator dalam membentuk konstruk (variabel laten) terlaksana uji validitas konvergen melalui model pengukuran berindikator refleksif nilai berdasar hubungan item skor dengan skor konstruk yang terhitung melalui SmartPLS. Refleksif individual disebut valid bila berkorelasi dengan konstruk (variabel laten) yang hendak terukur di atas 0,5 atau nilai T-statistik perlu di atas 1.980 (uji dua sisi, $n=122$, $\alpha/2$) di tingkat signifikan $\alpha = 0,05$. Bila indikator bernilai loading < 1.980, berarti perlu menyingkirkan indikator sebab mengindikasikan tidak baik dalam mengukur konstruk secara tepat.

Berdasar pengujian validitas konvergen, memperjelas bila:

- 1) Indikator: identifikasi (X1.1), keterlibatan (X1.2), dan loyalitas (X1.3) dari variabel laten komitmen organisasi (X1) bernilai loading di atas 0,5 dan t-statistik > 1.980. Dengan begitu, indikator tersebut valid selama mengukur variabel komitmen organisasi (X1), sehingga X1.1, X1.2, dan X1.3 tetap diikutsertakan dalam pengujian.
- 2) Indikator: latar belakang pendidikan (X2.1), diklat (X2.2), dan pengalaman (X2.3) dari variabel laten kompetensi sumber daya manusia (X2) bernilai loading di atas 0,5 dan t-

statistik > 1.980. Dengan begitu, indikator tersebut valid selama mengukur variabel SDM (X2) sehingga X2.1, X2.2, dan X2.3 tetap diikuti sertakan dalam pengujian.

- 3) Indikator: lingkungan pengendalian (X3.1), penilaian risiko (X3.2) dan informasi & komunikasi (X3.3) dari variabel laten sistem pengendalian intern (X3) bernilai *loading* di atas 0,5 dan t-statistik > 1.980. Dengan begitu, indikator tersebut valid mengukur sistem pengendalian intern (X3), sehingga X3.1, X3.2, dan X3.3 tetap diikuti sertakan dalam pengujian.
- 4) Indikator: akuntabilitas (X4.1); manajemen (X4.2); dan transparansi (X4.3) dari variabel laten penerapan standar akuntansi pemerintahan (X4) bernilai *loading* di atas 0,5 dan t-statistik > 1.980. Dengan begitu, indikator tersebut valid selama mengukur variabel Penerapan SAP (X4) sehingga X4.1, X4.2, dan X4.3 tetap diikuti sertakan dalam pengujian.
- 5) Indikator: sesuai (Y1), andal (Y2), bisa dijadikan perbandingan (Y3), bisa dimengerti (Y4) dari variabel laten mutu laporan keuangan (Y) bernilai *loading* di atas 0,5 dan t-statistik > 1.980. Dengan begitu, indikator tersebut valid selama mengukur mutu laporan keuangan (Y) sehingga Y1, Y2, Y3, dan Y4 tetap diikuti sertakan dalam pengujian.

Uji Validitas Diskriminan

Pengujian validitas diskriminan berguna agar bisa mencermati suatu indikator dari variabel laten apakah tidak sama dengan indikator variabel laten lain, maka indikator itu diasumsikan pantas untuk memperjelas variabel laten. Uji validitas diskriminan terlaksana melalui perbandingan akar *average variance extracted* (AVE) yang berhubungan antarvariabel laten. Indikator diasumsikan bisa memenuhi validitas konvergenya bila akar AVE di atas korelasi antarvariabel laten. Dari hasil pengujian validitas diskriminan bisa diketahui, akar AVE dari seluruh variabel yang dikaji di atas nilai korelasi paling tinggi antarvariabel bebas dengan variabel lain. Dengan begitu, indikator variabel komitmen organisasi (X1), komitmen SDM (X2), sistem pengendalian internal (X3), implementasi standar akuntansi pemerintah (X4), dan mutu laporan keuangan (Y), masih bernilai pengukuran konvergen atau indikator itu berlainan satu sama lainnya dari indikator yang ada di variabel laten lain, maka sesuai dipergunakan dalam pengukuran konstruk/variabel komitmen organisasi (X1), komitmen SDM (X2), sistem dalam mengendalikan internal (X3), implementasi standar akuntansi pemerintahan (X4), dan mutu laporan keuangan (Y). Artinya, indikator itu bervaliditas konvergen tinggi.

Pengujian Ulang Reliabilitas Komposit

Hasil pengujian ulang sesudah indikator yang tidak sesuai pengujian reliabilitas komposit disingkirkan dari model kajian. Sesuai hasil uji ulang komposit di Tabel 4.13., memperjelas bila komitmen organisasi (X1), kompetensi SDM (X2), sistem pengendalian internal (X3), implementasi standar akuntansi pemerintahan (X4), dan mutu laporan keuangan (Y), berukuran reliabilitas komposit di atas 0.70. Dengan begitu, indikator komitmen organisasi (X1), komitmen SDM (X2), sistem pengendalian internal (X3), implementasi standar akuntansi pemerintah (X4) dan mutu laporan keuangan (Y), saling menguatkan variabel laten atau bisa menentukan ukuran variabel laten.

Interpretasi Hasil analisis dengan *SmartPLS*

Evaluasi Model

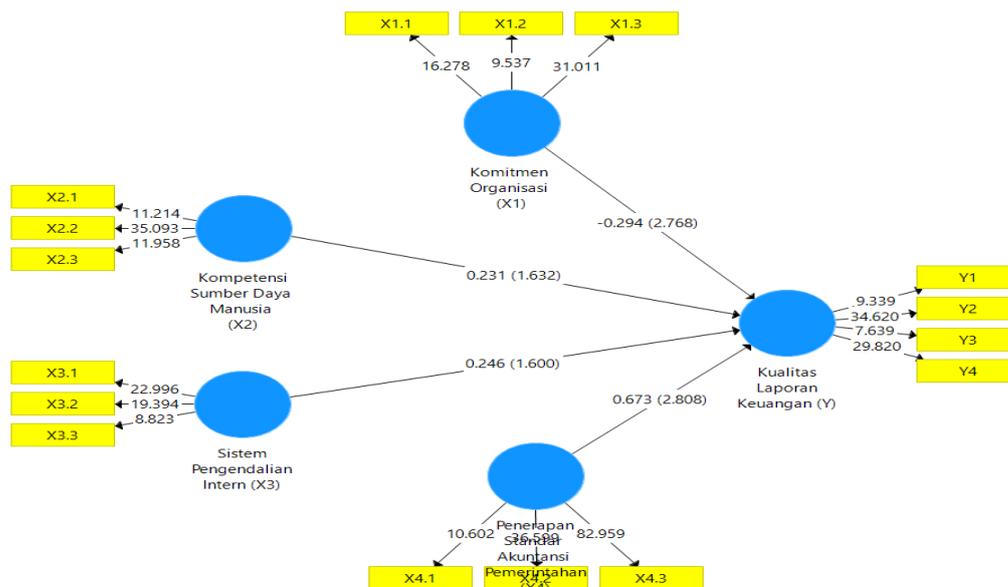
Evaluasi Konstruk Dependen

Pengevaluasian model mempergunakan r-square (R²) untuk konstruk terikat, nilai r-square itu merepresentasikan kekuatan prediksi dari seluruh model (Falk dan Miller, 1992; Pirouz, 2006) dengan nilai r-square di atas 0,10 (10%) (*goodness-fit dari model*). Sesuai analisis PLS tersebut, memperlihatkan hasil r-square, sebagai berikut: variabel bebas memengaruhi variabel dependen dengan kekuatan prediksi dari semua model terhadap variabel dependen sejumlah

0.730 (73,00%). Tersisa 27,00% yang dipengaruhi faktor lain yang tidak terdapat dalam model persamaan.

Pengujian Hipotesis

Dalam uji hipotesis, terlihat seberapa besar nilai t- statistik. Batas penolakan maupun penerimaan hipotesis yang terajukan, yaitu bila nilai t ada di kisaran-t tabel maupun +t tabel, berarti hipotesis tertolak atau menerima Ho. Gambar berikut memperjelas diagram jalur persamaan struktural berpendekatan PLS dan mempergunakan SmartPLS (Model T-Statistic) sebelum dilakukan seleksi terhadap Indikator tidak Valid dan tidak Reliabel (first order)



Gambar 3

Signifikansi indikator akan memberi informasi bermanfaat terkait korelasi antarvariabel. Landasan pengujian hipotesis ialah nilai output *result for inner weight*. Menguji hipotesis dengan PLS bisa terlihat melalui t-statistik dan probabilitas. Uji hipotesis mempergunakan nilai statistik sehingga alpha 5% nilai t-statistik yang dipergunakan 1,580, maka ketentuan menerima Ha atau menolak Ho saat t-statistik >1,580. Terkait penolakan/penerimaan hipotesis, maka bisa mempergunakan probabilitas sehingga Ha diterima bila nilai p di bawah 0,05 (Ghozali, 2015).

- 1) **Pengujian Hipotesis 2: Komitmen Organisasi (X₁) Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Y).** Berdasar pengujian hipotesis sesuai uji pembobotan/ *result for inner weights* diperoleh nilai koefisien jalur pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan sejumlah 0,294 dan bernilai t sejumlah 2,768, serta nilai signifikansi atau *p values* 0,006. Nilai signifikansi di bawah tingkat alpha 5% (0,05). Keputusannya, variabel komitmen organisasi berhubungan positif dan penting bagi mutu laporan keuangan. Atau berdasar pada hipotesis kedua, yaitu komitmen organisasi memengaruhi bermakna bagi kualitas laporan keuangan sehingga **Hipotesis 2 diterima**.
- 2) **Pengujian Hipotesis 3: Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₂) Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Y).** Berdasar pengujian hipotesis sesuai uji pembobotan/*result for inner weights* diperoleh nilai koefisien jalur pengaruh kompetensi SDM pada kualitas laporan keuangan sejumlah 0,231 bernilai t sejumlah 1,632, serta nilai signifikansi atau *p values* 0,039. Nilai signifikansi tersebut di bawah tingkat alpha 5% (0,05). Keputusannya, variabel kompetensi SDM berhubungan positif dan bermakna pada kualitas laporan keuangan atau berdasar pada, yaitu kompetensi SDM memengaruhi bermakna bagi kualitas laporan keuangan, maka **Hipotesis 3 diterima**.
- 3) **Pengujian Hipotesis 4 Sistem Pengendalian Intern (X₃) Memengaruhi Kualitas**

Laporan Keuangan (Y). Dari pengujian hipotesis sesuai uji pembobotan/*result for inner weights* diperoleh nilai koefisien jalur pengaruh sistem pengendalian intern bagi kualitas laporan keuangan sejumlah 0,246 bernilai t sejumlah 1,600, serta nilai signifikansi atau *P Values* 0,043. Nilai signifikansi tersebut di bawah alpha 5% (0,05) sehingga keputusannya, variabel sistem pengendalian internal berhubungan positif dan bermakna bagi kualitas laporan keuangan atau berdasar pada hipotesis keempat, yaitu sistem pengendalian inter memengaruhi penting bagi kualitas laporan keuangan, maka **Hipotesis 4 diterima.**

- 4) **Uji Hipotesis 5: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X4) Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Y).** Dari uji hipotesis sesuai uji pembobotan/*result for inner weights* diperoleh nilai koefisien jalur penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam memengaruhi mutu laporan keuangan sejumlah 0,673 bernilai t sejumlah 2,808, serta nilai signifikansi atau *P Values* 0,005. Nilai signifikansi tersebut di bawah tingkat alpha 5% (0,05). Keputusannya, implementasi standar akuntansi pemerintahan berhubungan positif dan penting bagi mutu laporan keuangan atau sesuai hipotesis kelima, yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah memengaruhi bermakna bagi mutu laporan keuangan. Maka terbukti **Hipotesis 5 diterima.**

PEMBAHASAN

Semua indikator penilaian mutu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang berkategori baik (73,26). Perolehan hasil ini memberikan gambaran bahwa masih terdapat kekurangan setiap waktu mendapatkan laporan keuangan bermutu. Guna memudahkan pengerjaan pelaporan keuangan, urutannya dimulai dari Laporan Operasional, dilanjutkan dengan Laporan Perubahan Ekuitas dan diakhiri dengan menyusun Neraca (Abdul Hafiz Tanjung, 2015: 378). Tujuan mencapai laporan berkualitas mendukung pernyataan dari Ifat Fauziah (2018: 27) menegaskan, laporan keuangan pemerintah bertujuan menyampaikan informasi yang memberi manfaat untuk pengguna terkait penilaian pertanggungjawaban dan menghasilkan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Komitmen Organisasi (X₁) Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Pembangunan komitmen organisasi berlandaskan rasa percaya pegawai terhadap nilai organisasi, kesediaan pegawai dalam membantu organisasi untuk merealisasikan tujuan, serta berkomitmen sebagai anggota organisasi. Melalui komitmen ini, masing-masing pegawai bakal bertanggung jawab dan sadar melaksanakan tugas, serta terdorong untuk menyampaikan laporan terkait kegiatannya, termasuk pelaporan keuangan yang bermutu. Widari (2017) dan Mutiana (2017) menyebut bila komitmen organisasi berdampak positif bagi mutu laporan keuangan. Komitmen organisasi mendukung hasil pengujian hipotesis sesuai dengan uji pembobotan/*result for inner weights*.

Diperoleh hasil variabel komitmen organisasi berhubungan positif dan bermakna bagi mutu laporan keuangan. Ini berdasar pada hipotesis kedua, yaitu komitmen organisasi memengaruhi bermakna bagi mutu laporan keuangan. Analisis deskriptif dalam penelitian ini juga, menjelaskan tanggapan pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Kupang dari 90 responden atas komitmen organisasi dari 9 item tanggapan pernyataan dari variabelnya, dimana masing-masing tanggapan pernyataan berada dalam kategori baik.

Dilihat dari rata-rata masing-masing indikator yakni identifikasi, keterlibatan dan loyalitas dikategori baik, sehingga secara umum komitmen organisasinya baik dengan skor 70,69. Kajian sebelum yang mendukung temuan di atas berasal dari Stasya Meily Tingginehe, Hans Hananto Andreas, Marwata (2021), yang melaporkan bila komitmen organisasi, pemakaian teknologi, implementasi SAP, supervise keuangan daerah memengaruhi bermakna bagi mutu LKD di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Talaud. Lain dengan implementasi SPIP tanpa memengaruhi signifikan bagi mutu laporan keuangan daerah SKPD Pemda Talaud.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₂) Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Menurut Rizki Afri Mulia (2018), kompetensi SDM maupun sistem pengendalian internap berakibat penting bagi mutu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Temuan Mulia (2018) memperkuat temuan dari Wirmie Eka Putra (2017), bila standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kualitas SDM memengaruhi bermakna bagi mutu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Temuan sebelumnya dikuatkan dengan hasil temuan, bahwa kompetensi SDM berhubungan positif dan penting bagi mutu laporan keuangan atau berdasar pada hipotesis ketiga, yaitu kompetensi SDM memengaruhi cukup penting bagi mutu laporan keuangan. Hasil pengujian statistik dikuatkan oleh analisis deskriptif dari penilaian Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Kupang atas kompetensi SDM aparatur negara, melalui pengukuran dari 9 item tanggapan atas pernyataan variabel kompetensi SDM, masing-masing pernyataan dalam kategori baik dan cukup baik. Maka rata-rata masing-masing indikator yakni latar belakang pendidikan, diklat dan pengalaman berada dalam kategori baik, sehingga dari semua indikator yang dinilai dan diambil rata-rata atas penilai kompetensi SDM aparatur negara dengan skor 71,01 berkategori baik.

Sistem Pengendalian Intern (X₃) Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Y)

SPI memiliki hubungan positif dan cukup penting bagi mutu laporan keuangan atau sesuai dengan hipotesis keempat yaitu SPI memengaruhi cukup penting bagi mutu laporan keuangan. Terbukti bahwa Hipotesis 4 diterima. Hasil uji statistik ini, diperkuat dengan analisis deskriptif menjelaskan penilaian atas SPI laporan keuangan berkualitas atas kinerja aparatur Negara dari pengukuran 9 item tanggapan atas pernyataan variabel sistem pendalian intern, masing-masing pernyataan dalam kategori baik maka rata-rata masing-masing indikator yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko maupun informasi komunikasi berkategori baik, maka semua indikator menilai sistem pendalian intern berkategori baik (70,81). Temuan ini mengonfirmasi temuan Rizki Afri Mulia (2018), melaporkan jika kompetensi SDM dan SPI berpengaruh signifikan bagi mutu laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Temuan Mulia (2018) memperkuat temuan dari Wirmie Eka Putra (2017), melaporkan jika standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, mutu SDM memengaruhi signifikan bagi kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah Kota Jambi.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₄) Berpengaruh ke Kualitas Laporan Keuangan (Y)

SAP sebagai landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat dan daerah/kota dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang harus dicapai (Bastian, 2006 dalam Harlinda 2016: 131)). Dari pengujian hipotesis sesuai uji pembobotan/*result for inner weights* diperoleh variabel penerapan SAP memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kualitas laporan keuangan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis kelima yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.

Sejalan dengan analisis deskriptif dari penilaian pimpinan OPD Kota Kupang atas penerapan SAP oleh aparatur Negara melalui pengukuran dari 9 tanggapan atas pernyataan variabel penerapan SAP. Masing-masing pernyataan dalam kategori baik dan cukup baik. Rata-rata masing-masing indikator yakni akuntabilitas, manajemen dan transparansi berada dalam kategori baik, sehingga dari ketiga indikator yang diukur dan diperoleh penilai atas penerapan standar akuntansi pemerintahan oleh aparatur negara di Kota Kupang, dengan skor 71,75 atau kategori baik. Temuan kajian memperkuat temuan sebelumnya dari Gusrya Indria Sari, Fadli (2017), mengidentifikasi faktor yang berakibat ke mutu laporan finansial daerah, bila implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, implementasi SAP, pemakaian sistem informasi akuntansi keuangan daerah berakibat penting ke mutu laporan keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasar hasil uraian di atas, simpulan yang bisa peneliti sampaikan, yaitu: Penilaian atas komitmen organisasi, kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, implementasi standar akuntansi pemerintahan maupun mutu laporan keuangan pemerintah oleh pimpinan OPD Kota Kupang berkategori baik; Komitmen Organisasi (X_1) berpengaruh pada kualitas laporan keuangan (Y), dengan nilai koefisien jalur pengaruh komitmen organisasi terhadap mutu laporan keuangan adalah sejumlah 0,294 bernilai t sejumlah 2,768, serta nilai signifikansi atau P Values 0,006; Kompetensi SDM (X_2) berpengaruh mutu laporan keuangan (Y), dengan nilai koefisien jalur pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan sejumlah 0,231 bernilai t sejumlah 1,632, serta nilai signifikansi atau p values 0,039; Sistem pengendalian intern (X_3) berpengaruh ke mutu laporan keuangan (Y), dengan nilai koefisien jalur sistem pengendalian internal dalam memengaruhi mutu laporan keuangan sejumlah 0,246 dengan nilai t sejumlah 1,600 dan nilai signifikansi atau p values 0,043; Penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_4) memengaruhi pada mutu laporan keuangan (Y), dengan nilai koefisien jalur pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan sejumlah 0,673, nilai t sejumlah 2,808 dan nilai signifikansi atau P Values 0,005.

SARAN

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang
 - a) Meningkatkan komitmen organisasi pegawai pengelola keuangan untuk terus mengoptimalkan komitmen organisasi dalam menunjang penyelenggaraan tugas tata kelola keuangan demi menciptakan laporan keuangan yang bermutu.
 - b) Mengoptimalkan kemampuan pegawai pengelola keuangan. *Pertama*, pimpinan pemerintah daerah mengarahkan dan memberi sarana pendukung agar pengelola keuangan bisa belajar terkait bidang akuntansi. *Kedua*, peningkatan partisipasi karyawan dengan menyediakan pelatihan/kursus mengenai tata kelola keuangan daerah. *Ketiga*, penempatan karyawan yang mengelola keuangan di SKPD wajib berdasar pada kompetensi SDM yang tersedia.
 - c) Meningkatkan sistem pengendalian intern, yaitu pimpinan instansi menjadi pelaksana pengendalian internal wajib berkomitmen tinggi selama menjalankan sistem pengendalian intern melalui perumusan maupun penerapan standar pengendalian intern.
 - d) Meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintahan, yakni saat membuat laporan keuangan, harus selalu dilandaskan dengan standar akuntansi pemerintahan demi mengoptimalkan mutu laporan keuangan.
2. Bagi kajian berikutnya
Peneliti berikutnya bisa memberi variabel bebas lainnya yang tidak ada di kajian ini supaya bisa tahu faktor lainnya yang bisa saja berpengaruh ke mutu laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fauziah, Ifat, 2018. *SAP, Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Ilmu, Cetakan I.
- Ghozali, Imam, Hengky Latan. 2015. *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. BP Undip: Semarang.
- Suwardjono.2015. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi Pemerintahan Daerah, Konsep dan Aplikasi*. Cetakan Kedua, Alfabeta Bandung.

Dokumen

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2020. Siaran Pers BPK RI 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 Kota Kupang*.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2021. Siaran Pers BPK RI 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 Kota Kupang*.

Jurnal

Dian, Nonce. (2017). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda). *Jurnal Akuntansi, Universitas Mulawarman, Jl Tanah Grogot No.1, Samarinda, Kalimantan Timur 75119, Indonesia*.

Mulia, Rizki Afri. (2018). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal El-Riyasah: Volume 9 Nomor 1*.

Putra, Wirmie Eka. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu: Vol. 10 No.2, Hal.282–293*.

Tingginehe, Stasya Meily, Andreas, Hans Hananto dan Marwata. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA: Vol.9 No.1 Januari 2021, Hal. 1352-1359*.